

20130

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
MENANGANI TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
TERHADAP BURUH WANITA**

Tesis

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Profesi Advokat**



012/S2/MPA/C1
28-4-09

Oleh :

**NAMA : Nova Lenawati
NIM : 06.93.0161**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM PROFESI ADVOKAT
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

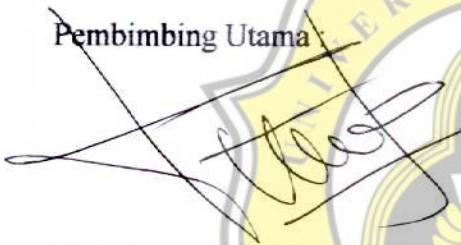
HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : NOVA LENAWATI
Nim : 06.93.0161
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Bidang Konsentrasi : PROFESI ADVOKAT
Judul Tesis :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BURUH WANITA

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Widanti S, SH.CN

Tgl : 25 Nopember 2008

Pembimbing Pendamping :



Endang Wahyati SH, M.Hum.

Tgl : 25 Nopember 2008



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

PROGRAM MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI PROFESI ADVOKAT
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :
Nama : NOVA LENAWATI
Nim : 06.93.0161

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 4 Novemberr 2008

Susunan Dewan Penguji

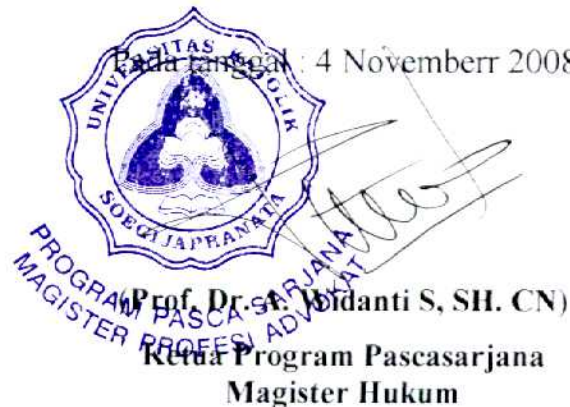
Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN
2. Endang Wahyati Y, SH.MH
3. Yovita Indrayati, SH..MHum



Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kosentrasi Profesi Advokat.

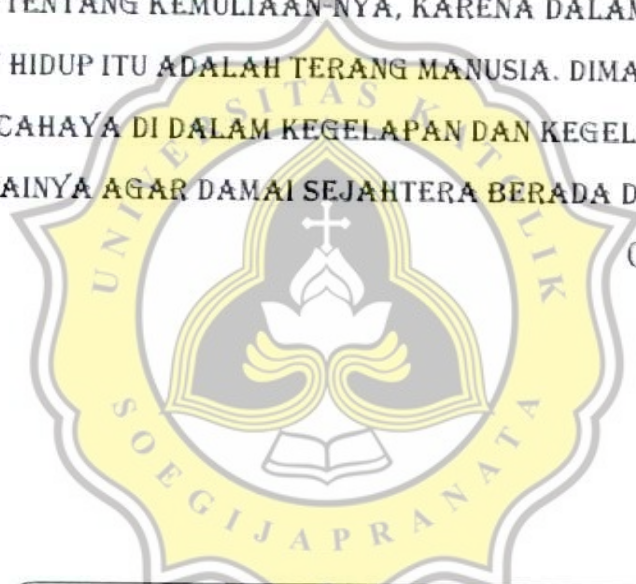
Pada tanggal : 4 Novemberr 2008



Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG APAPUN JUGA, TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN DENGAN UCAPAN SYUKUR (FILIPI 4:6)

SEBAB ALLAH YANG TELAH BERFIRMAN "DARI GELAP AKAN TERBIT TERANG IA JUGA YANG MEMBUAT TERANGNYA BERCAHAYA DI DALAM HATI KITA SUPAYA KITA BEROLEH TERANG DI PENGETAHUAN TENTANG KEMULIAANNYA, KARENA DALAM DIA ADA HIDUP DAN HIDUP ITU ADALAH TERANG MANUSIA. DIMANA TERANG ITU BERCAHAYA DI DALAM KEGELAPAN DAN KEGELAPAN ITU TIDAK MENGUASAINYA AGAR DAMAI SEJAHTERA BERADA DALAM HIDUPMU" (YOHANES 1:4-5)



KUPERSEMBAHKAN :

- 1. PAPA**
- 2. MAMA**
- 3. KOKO CHARLES SURYADI, SE**
- 4. My Beloved dr. ANWAR**

PERNYATAAN KEASLIAN

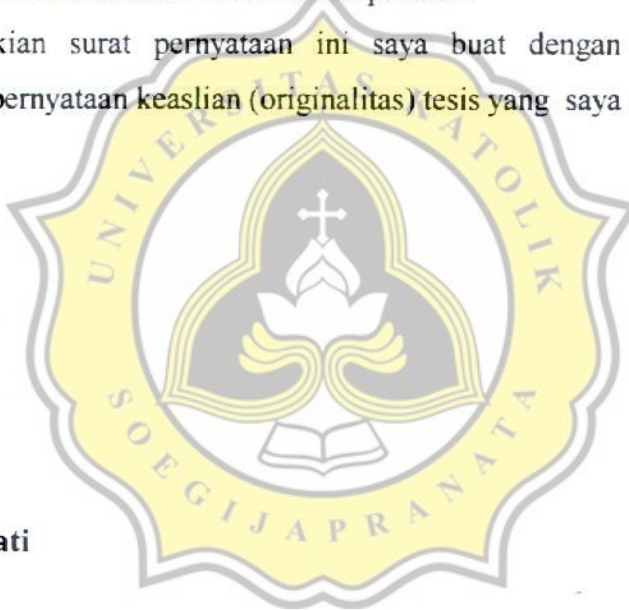
Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Semarang,

Hormat saya,

Nova Lenawati



Government's Policy in Settling the Cases of Violation and Discrimination against Woman Labor

ABSTRACT

There are many Indonesian women forced to earn a living because of some reasons, such as domestic economical problems, specific skills they have gained, as well as disharmony they experience at their homes. Many women labors factually experience violence and discrimination in their workplaces. They do not get sufficient leave of getting birth. They are forced to work in a long and hard hours and are sometimes badly treated by their employers. Besides, women labors usually retire earlier than men labors. This study pursues understanding on 1) the Government's policy in settling the cases of violation and discrimination against women labors, 2) efforts taken by the Government to settle such cases, 3) obstructions faced by the Government in exercising the efforts.

This study applies sociological legal study approach and analytical descriptive exposition. This approach is considered appropriate in relating the gained data of violation and discrimination against women labors acts and the prevailing legal norms on protection of women labors against violation and discrimination, specifically the Act nr. 13/2003 on Labor Affairs and the Act nr. 21/1999, and the Act nr. 80/1957. The data are then qualitatively analyzed.

The result of this study, firstly, shows that public policies on preventing and settling violation and discrimination against woman labor have actually been made and issued by the Government but they are not accompanied by operational regulations to execute them. Secondly, some efforts, such as to provide information on labor affairs, to educate the employers in order to appreciate the labors' achievement, to watch the execution of *Jamsostek* program, to develop partnership between employers and employees, to gather and process the data regularly, and to enforce the existing legal norms, have factually been conducted by the Government. Thirdly, some obstructions appearing are caused by some factors, among others, the work of Semarang's Labor Office (*Disnaker*) that is assumed passive (not pro-active) in watching the practices of violation and discrimination in Semarang beside the women labors themselves never bring their cases to the Office.

It is necessary that the Government soon makes technical and operational norms to avoid violation and discrimination against women labors. Besides, the Government should enforce the existing legal norms to be executed so that they will effectively reduce or even eliminate violation and discrimination against women labors.

Keywords: Government's Policy, Woman Labor, Violation and Discrimination

ABSTRAK

Banyak sekali wanita yang bekerja karena beberapa alasan antara lain : faktor ekonomi demi kelangsungan hidup, karena mempunyai kepandaian dalam bidang tertentu dan juga karena kurang harmonisnya dalam berumah tangga sehingga menyebabkan wanita harus berkerja. Dalam kenyataannya buruh wanita yang bekerja banyak sekali yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi seperti tidak mendapat cuti reproduksi, jam kerja yang padat, usia pensiun yang berbeda dengan buruh pria dan diperlakukan tidak baik oleh majikan/pengusaha. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk mengetahui : 1) kebijakan Pemerintah dalam menangani tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita. 2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita. 3) Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam upaya menangani tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan spesifikasi Diskriptif analitis. Metode ini dilakukan karena penelitian yang dimaksudkan untuk mencari data tentang tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh buruh wanita yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang ketenagakerjaan khususnya kebijakan tentang perlindungan bagi buruh wanita yang tersebar pada (UU Ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003, Undang-undang nomor 21 tahun 1999, Undang-undang nomor 80 tahun 1957). Data yang terkumpul dianalisa dengan metode kualitatif.

Studi ini menghasilkan simpulan antara lain : 1) Kebijakan umum mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita telah dikeluarkan oleh pemerintah namun kebijakan khusus dan kebijakan operasional tentang hal ini belum ada. 2) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita antara lain : (a) melakukan penyuluhan – penyuluhan di bidang ketenagakerjaan, (b) menumbuhkan sikap pengusaha untuk menghargai karya / prestasi dalam bekerja, (c) pengawasan terhadap program jamsostek, (d) mengembangkan sikap kemitraan, (e) pendataan secara berkala dan penegakan peraturan. 3) Hambatan dipengaruhi dari berbagai faktor antara lain : : (a) sikap Disnaker yang tidak proaktif dalam hal pengawasan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Semarang, (b) buruh wanita tidak melaporkan mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialaminya.

Oleh karena itu Pemerintah perlu segera membuat ketentuan teknis dan operasional tentang tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita. Disamping itu adanya penegakkan peraturan sehingga ketentuan hukum yang sudah ada dapat efektif terlaksana.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Buruh wanita, Tindak kekerasan dan diskriminasi

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BURUH WANITA**

Penulis mengangkat judul tersebut karena penulis tertarik akan banyaknya buruh wanita yang bertempat tinggal di kawasan Mangkang, Desa Wonosari Kota Semarang yang mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi meskipun peraturan peraturan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap buruh wanita telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Tesis ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Magister Hukum Konsentrasi Profesi Advokat pada Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik dari pihak pihak yang menaruh perhatian untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah memberkati, membimbing hingga selesai tesis ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN. Selaku ketua Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang dan selaku Dosen pembimbing I ,

3. Ibu Endang Wahyati SH., M Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Yovita Indrayati, SH., Mhum selaku Dosen Penguji.
5. Ibu Dewi Indrihastuti SH, terima kasih karena penulis diperbolehkan untuk meneliti di Disnaker Kota Semarang
6. Mama dan Papa yang telah mendoakan dan mendukung dari awal hingga akhir.
7. Koko Charles Suryadi, SE yang telah membantu adikmu ini
8. Sahabatku Diana Kusuma yang telah mendukung dan mendengarkan keluhan kesah.
9. Wahyu (Balikpapan), Stanley (Jakarta) dan Budi (Semarang) untuk dukungan dan motivasinya.
10. Team PD Justinus Atmodiriono dan team doa Syafaat.
11. Mba Puji, mas Patrick dan Pak Agus atas semangat dan info infonya untuk kelancaran tesis ini.
12. Hendra SH dan Handoko SH, yang selalu mengingatkan penulis untuk rajin menyusun tesis dan banyak membantu penulis.

Semarang, 25 Nopember 2008

Nova Lenawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Membuat Ketetapan Mengenai Ketenagakerjaan	9
1. Kebijakan Publik	9
2. Perbuatan Pemerintah Dalam Membuat Ketetapan	12
B. Buruh Wanita dan Hubungan Kerja	15
1. Definisi Buruh	15
2. Dasar Hukum Hubungan Kerja	15
3. Akibat Hukum Terjadinya Hubungan Kerja	16
4. Perlindungan Hukum Buruh Wanita	17
C. Tindak Kekerasan Dan Diskriminasi Wanita	19
1. Definisi kekerasan dan diskriminasi buruh wanita	19
2. Penyebab terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi buruh wanita	20
3. ketentuan hukum perlindungan wanita dari tindak kekerasan dan diskriminasi	20
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Pendekatan	27

B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Metode Populasi dan Penarikan Sampel	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Buruh Wanita	32
2. Hasil Wawancara	38
3. Kebijakan pemerintah dan Upaya Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Buruh Wanita	55
4. Hambatan Hambatan yang dihadapi Pemerintah	58
B. Pembahasan	61
1. Kebijakan Pemerintah dalam menangani tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita	61
a. Kebijakan umum mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita	61
b. Kebijakan Khusus mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita	64
2. Upaya-upaya pemerintah dalam melindungi buruh wanita terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi	74
a. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan	74
b. Upaya pemerintah melalui Disnaker	76
3. Hambatan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita	81
a. Dari segi teknis	81
b. Dari segi Yuridis	82
c. Dari Pihak Disnaker	82
d. Dari Pihak Buruh Wanita	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	viii

